

## ABSTRAK

Konversi lahan pertanian pangan yang terjadi secara terus menerus dan tidak diimbangi dengan pembuatan lahan pertanian baru, bisa berakibat pada ancaman krisis lahan pertanian pangan. Bila lahan pertanian hilang maka para petani akan kehilangan sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Diperlukan adanya campurtangan pemerintah dalam mengendalikan konversi lahan dengan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kabupaten Sleman merupakan daerah lumbung pangan dan resapan air, namun tiap tahun mengalami penyusutan lahan pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan PLP2B diterapkan di Kabupaten Sleman untuk menekan angka konversi lahan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran tentang keadaan realita yang terjadi dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sleman. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Kabupaten Sleman belum memiliki Perda khusus untuk PLP2B dan belum ada penetapan lahan PLP2B, upaya pengendalian konversi lahan dengan mengendalikan perizinan penggunaan lahan. Kepentingan kelompok sasaran seperti mendapatkan harga komoditas yang menguntungkan, dan kompensasi bila terjadi gagal panen belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Manfaat bagi petani seperti insentif dari pemerintah berupa keringanan pajak belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani, fasilitas infrastruktur dan sarana prasarana pertanian sudah memadai, dan pemberian sertifikasi lahan pertanian secara sporadik sudah berjalan namun sertifikasi masih bersifat umum belum khusus lahan pertanian. Strategi yang digunakan oleh petugas pelaksana belum berfungsi secara efektif. Tingkat kepatuhan dan responsivitas petani pemilik lahan masih bersifat kondisional, melihat kebutuhan keluarga dan peluang ekonomi. Konversi lahan terus terjadi dengan luas lahan pemukiman semakin meningkat, sedangkan luas lahan pertanian semakin menurun.

Pemerintah harus memberikan perlindungan masalah harga pertanian, mempermudah persyaratan pengajuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, strategi yang digunakan oleh petugas pelaksana mesti didiskusikan dengan masyarakat kembali, sangat dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari Kepala Daerah.

*Kata Kunci — Implementasi Kebijakan, Perlindungan Lahan, Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pembangunan Berkelanjutan.*

## ABSTRAK

Conversion of agricultural land that occurs continuously and not offset by the creation of new agricultural land, could result in the threat of food crop farming crisis. When farmland is lost farmers lose economic resources to meet the needs of their families. There is a need for government intervention in controlling land conversion with Sustainable Food Sustainability (PLP2B). Sleman regency is a barn area of food and water absorption, but each year experiencing shrinkage of agricultural land. The purpose of this research is to know the extent to which PLP2B policy applied in Sleman Regency to suppress land conversion rate?

The research method used in this research is qualitative descriptive, with the research method is expected to provide a description of the state of reality that occurred in the protection of sustainable agricultural land in Sleman regency. While the data collection techniques used are interviews and documentation.

Sleman District does not have special regulations for PLP2B and there is no land use of PLP2B, controlling land conversion by controlling land use permit. The interests of target groups such as obtaining favorable commodity prices, and co-opens in case of crop failure have not been met by the Regional Government. Benefits for farmers such as government incentives in the form of tax relief have not been maximally utilized by farmers, infrastructure facilities and agricultural infrastructure facilities are adequate, and sporadic certification of agricultural land has been running but certification is still general yet special agricultural land. The strategy used by the implementing officers has not functioned effectively. The level of compliance and responsiveness of land-owning farmers is still conditional, looking at family needs and economic opportunities. Conversion of land continues to occur with the area of residential land is increasing, while the area of agricultural land is declining.

The government should provide protection for agricultural price issues, simplify the requirements for land and building tax relief, the strategy used by the implementing officers should be discussed with the community again, much needed commitment and consistency from the Regional Head.

*Keywords - Policy Implementation, Land Stewardship, Sustainable Food Agriculture, Sustainable Development.*